## TAJUK RENCANA

# Menindak Entitas Keuangan Ilegal

**OTORITAS** Jasa Keuangan (OJK) telah menghentikan 1.642 entitas keuangan ilegal sejak 1 Januari hingga 11 November 2023. Dari jumlah tersebut, 18 di antaranya merupakan investasi ilegal dan 1.623 pinjaman online (pinjol) ilegal. Dibanding kasus yang diadukan masyarakat, jumlah tersebut masih jauh di bawahnya. Berdasar data OJK, pengaduan entitas ilegal mencapai 9.380, meliputi pengaduan pinjol ilegal 8.991 dan pengaduan investasi ilegal sebanyak 388 (KR 6/12).

Mencermati data tersebut, nampak bahwa pengaduan pinjol ilegal mendominasi dibanding investasi ilegal. Kita memahami mengapa tidak semua pengaduan diproses hingga diambil tindakan penghentian. OJK pasti telah memverifikasi, mana aduan yang memang harus segera ditindaklanjuti dan diproses, termasuk diambil tindakan penghentian.

Kita mengapresiasi langkah OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) menindak dan menghentikan entitas keuangan ilegal yang tentu sangat meresahkan masyarakat. Selain itu, OJK juga berkomitmen mendorong terwujudnya literasi dan inklusi keuangan bagi semua pihak, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Hemat kita, upaya tersebut tak boleh berhenti dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Pasalnya, masih banyak anggota masyarakat yang tidak memahami modus operandi yang dilancarkan pelaku investasi ilegal dan pinjol ilegal. Meski sebelumnya sudah banyak jatuh korban, kedua entitas tersebut masih saja beroperasi dan mencari sasaran di masyarakat. Beberapa modus yang dilancarkan pelaku investasi ilegal antara lain dengan menawarkan keuntungan berlipat-lipat jauh di atas bunga bank konvensional.

Ini berbeda dengan modus pinjol online yang menawarkan kemudahan bagi mereka yang mengambil pinjaman online, bisa langsung cair, namun dengan bunga sangat tinggi, atau sering diistilahkan bunga berbunga. Akibatnya, peminjam tak mampu untuk melunasi. Di sinilah kemudian muncul berbagai teror dari pengelola pinjol ilegal, hingga membuat debitur depresi bahkan ada yang bunuh diri. Aparat penegak hukum bersama OJK telah mengambil tindakan tegas terhadap pengelola pinjol ilegal, namun nyatanya mereka masih beroperasi secara diam-diam.

Menghentikan operasi pinjol ilegal memang tak serta merta menyelesaikan masalah. Sebab, mereka terus bergerak dan bermetamorfosa menjadi nama baru, sementara pelakunya sama. Satu usaha dihentikan, usaha lain bergerak dan terus menebar teror di masyarakat ketika pinjaman tak segera dilunasi. Bahkan, pinjaman sudah dilunasi sekalipun, debitur masih saja dikejar hingga mengalami depresi. Dalam suatu kesempatan Menkopolhukam Mahfud MD pernah mengatakan untuk mengabaikan permintaan pinjol online dan segera lapor polisi.

Tentu persoalannya tak sesederhana itu. Pengelola pinjol ilegal mungkin telah mengantisipasi kemungkinan korban melapor, sehingga mereka akan bergerak secara diam-diam dan hati-hati. Meski begitu, kita mendorong korban untuk tetap melapor ke aparat penegak hukum agar mendapat jaminan keselamatan.

Berkaitan itulah kita mendorong upaya literasi keuangan yang dijalankan OJK serta aparat penegak hukum dijalankan secara masif karena masih banyak anggota masyarakat yang belum paham terkait investasi sehat serta jasa pinjaman online yang kredibel. Di samping itu, masyarakat perlu proteksi diri, tidak gampang tergiur investasi bodong yang menawarkan keuntungan berlipat-lipat. ❑-d

# Perbedaan dan Kerja Sama OJK - BI

**Y Sri Susilo**

**TIDAK** terasa sudah 12 tahun Otoritas Jasa Keuangan OJK telah menjalankan fungsi dan tugasnya, 12 November lalu. Seperti diketahui, berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK merupakan lembaga negara yang independen dalam mengawasi mikro sektor keuangan.

Dalam UU Omnibus Law Keuangan, OJK memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Adapun fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Selain itu, memelihara stabilitas sistem keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya. OJK juga memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat.

Beberapa tugas yang harus diemban OJK adalah pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon. Juga mengatur dan mengawasi perasuransian, penjaminan, dan dana pension, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya. (Pasal 8 angka 4 UU Nomor 4 Tahun 2023).

**Perbedaan**

Dalam menjalankan fungsi dan tugas tersebut, OJK berkoordinasi kementerian/lembaga dan otoritas terkait misalnya Bank Indonesia (BI). BI dan OJK memiliki persamaan yaitu sebagai lembaga negara yang bersifat independen dan bertujuan untuk memelihara sistem keuangan.

Perbedaan antara BI dan OJK adalah tugas dan wewenang BI mencakup segala hal terkait dengan kebijakan moneter, menjaga arus sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial. Dalam konteks perbankan, wewenang BI berhubungan dengan pengaturan dan pengawasan perbankan yang bersifat makroprudensial seperti memperkuat ketahanan permodalan dan mencegah *leverage* berlebihan, mengelola fungsi intermediasi dan mencegah terjadinya risiko sistemik, serta pemeriksaan terhadap bank.

Sementara itu, tugas dan wewenang OJK mencakup hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan dan pengawasan yang bersifat mikroprudensial. Sifat termaksud adalah pengaturan dan pengawasan detail terkait dengan kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank.

Perbedaan selanjutnya adalah dalam hal kebijakan dan regulasi. BI memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan moneter dan kebijakan terkait perbankan, seperti suku bunga dan likuiditas. Di sisi lain OJK, bertanggung jawab untuk mengeluarkan peraturan terkait pengawasan dan regulasi sektor perbankan. Mereka juga memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada bank yang melanggar peraturan.

Salah satu keberhasilan OJK adalah meningkatnya indeks literasi dan inklusi keuangan. Seperti diketahui, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 menunjukkan bahwa indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia mengalami kenaikan menjadi 49,68% dan 85,10%. Dari data tersebut, masih ada gap antara indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan sebesar 35,42%. OJK harus lebih bekerja keras untuk mempersempit gap tersebut.

**Pinjaman Online**

Dalam kurun waktu terakhir, masih terdapat banyak kasus terkait pinjaman online (pinjol) dan beberapa kasus gagal bayar asuransi di tengah masyarakat. Mengacu pada kasus tersebut maka OJK harus lebih meningkatkan intensitas edukasi pinjol kepada masyarakat. Di samping, kualitas pengawasan terhadap industri asuransi harus lebih baik.

Catatan penutup, BI dan OJK memiliki peran yang penting dalam pengaturan dan pengawasan sektor perbankan di Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan dalam cara mereka melaksanakan tugas-tugas mereka, keduanya bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kerja sama ini penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan sistem perbankan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. ❑-d

*) ***Dr Y Sri Susilo**, Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan FBE UAJY, Pengurus Pusat ISEI dan Pengurus Kadin DIY.*

## Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat.* Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

# Pengaruh Keluarga dalam Kepemimpinan

**Niyoko**

**KEPEMIMPINAN** adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya sehingga orang-orang yang dipimpinnya itu mengikuti perilaku yang dikehendaki pemimpin. Kepemimpinan ada yang bersifat resmi dan tidak resmi. Kepemimpinan resmi dalam pelaksanaannya berada di atas landasan-landasan, peraturan-peraturan resmi, sehingga kewenangannya terbatas sesuai dengan peraturan-peraturan yang wajib ditaatinya.

Sedangkan kepemimpinan tidak resmi memiliki ruang lingkup yang tidak dibatasi peraturan-pertauran resmi. Karena kepemimpinan tidak resmi didasari atas pengakuan dan kepercayaan masyarakat. Ukuran benar tidaknya kepemimpinan tidak resmi terletak pada tujuan dan hasil kepemimpinannya tersebut yang dianggap menguntungkan atau merugikan masyarakat.

**Kriteria**

Masyarakat mempunyai kriteria mengenai sifat-sifat yang harus dipunyai seorang pemimpin. Sebagai contoh, masyarakat Jawa menghendaki seorang pemimpin wajib memiliki sifat *Ing ngarsa sung tuladha, Ing madya mbangun karsa, tut wuri handayani* (Di muka memberi teladan, Di tengah-tengah membangun kehendak/semangat, Di belakang memberi kekuatan/pengaruh). Selain itu, terdapat juga kriteria kepemimpinan sebagaimana diajarkan dalam 'Asta Brata'.

Menurut 'Asta Brata' kepemimpinan yang baik harus memiliki delapan sifat-sifat sebagai berikut: *Indra Brata* artinya memberi kesenangan jasmani. *Yama Brata* menunjuk pada keahlian dan kepastian hukum. *Surya Brata* artinya menggerakkan bawahan dengan mengajak orang untuk bekerja. *Candra Brata* maksudnya memberi kesenangan rohani. *Bayu Brata* menunjukkan keteguhan pendidikan dan turut serta merasakan kesukaran-kesukaran dari pengikut-pengikutnya. *Kuwera Brata* menunjukkan pada suatu sikap yang patut dihormati. *Baruna Brata* menunjukkan kelebihan di dalam ilmu pengetahuan, kepandaian, dan keterampilan dan *Agni Brata* sifat memberi semangat kepada para pengikutnya.

Setiap orang memulai kehidupannya dalam keluarga. Setiap pribadi selalu membentuk akar kepribadiannya dalam komunitas di mana ia memulai kehidupannya. Kualitas pribadi sangat ditentukan kualitas lingkungan keluarga, tempat seseorang bertumbuh dan berkembang. Anak-anak yang tidak biasa berdisiplin di dalam keluarga, cenderung sulit mengikuti disiplin di dalam hidupnya. Anak-anak yang dibesarkan tanpa aturan yang jelas, cenderung mengalami kesulitan di tengah hidup masyarakat.

Pola asuh orang tua juga sangat berpengaruh pada anak-anak. Orang tua yang otoriter cenderung menghasilkan anak yang suka memberontak. Pola asuh orang tua yang permisif menghasilkan anak-anak yang memiliki standar moral yang lemah, karena semua serba boleh, sulit menolak desakan naluri alaminya. Sedangkan pola asuh orang tua yang demokratis menghasilkan anak-anak yang tahu menghargai perbedaan (toleran).

**Hasil Kepemimpinan**

Para pemimpin yang selama ini telah dipercaya oleh masyarakat, hasil kemimpinannya sudah dapat dilihat dan dirasakan apakah mereka bermanfaat atau tidak bagi masyarakat. Mereka termasuk pemimpin otoriter atau demokratis atau *laissez faire*, dipengaruhi bagaimana latar belakang pola asuh keluarga para pemimpin tersebut.

Jika sebentar lagi masyarakat akan memilih pemimpin bangsa baik pemimpin di bidang eksekutif maupun legislatif, masyarakat bisa mencari jejak bagaimana latar belakang keluarga mereka. Apakah mereka memiliki keluarga yang harmonis atau berantakan, keluarga yang religius atau duniawi (materialistis). Karakter mereka juga dapat dilihat, apakah mereka bersifat konsisten atau *mencla-mencle* (inkonsisten), tinggi hati atau rendah hati, jujur atau suka bohong, apakah mereka memiliki sifat-sifat kepemimpinan 'Asta Brata', dan seterusnya, semua itu dengan mudah dapat dicari jejaknya di era digital sekarang ini.

Dengan melihat dan menilai bagaimana latar belakang keluarga maupun keluarga para calon pemimpin, diharapkan masyarakat bisa lebih cermat dalam menentukan pilihan,. Siapa gerangan yang dinilai patut dan layak menjadi pemimpin. ❑-d

*) ***Dr Niyoko SPd BTh MPd**, Dosen MKU UNY*

## PIKIRAN PEMBACA

**Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik**

Naskah dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

## Bekas SPBU Yang 'Pating Sranthil'

**DIY** masih menjadi pusat perhatian pariwisata tanah air. Karena itulah DIY harus tetap fokus untuk menciptakan destinasi yang tetap keren. Sayanganya, beberapa tempat menjadi tidak indah, karena tidak diperhatikan.

Salah satu di antara misalnya lokasi bekas SPBU di dekat Bulaksumur yang dulu adalah makam Tionghoa. Sekarang SPBU-nya ditutup, bahkan 'sudah dihancurkan'. Semula pagarnya rapi ditutupi, ada yang pakai seng, spanduk atau apapun slogan kebersihan. Namun lama kelamaan kondisinya berubah. Sekarang, ketika hujan panas menerpa maka tutup tersebut rusak. Plastik penutup pagar menjadi compang camping, tidak indah dipandang mata.

Sebentar lagi, liburan Natal dan Tahun baru tiba. Wisatawan yang masuk Yogya akan disuguhi bekas SPBU yang compang-camping pagarnya, lusuh dan terkesan 'kapiran'. Usul saya, semoga pagar itu dirapikan pagi, agar enak dipandang mata. Entah siapa yang bertanggung jawab merapihkan.

**) Ir Sutandyo Probo, Glagahsari, Yogyakarta.*

## Antisipasi 'Ledakan Sampah' Saat Liburan

**PENGALAMAN** waktu-waktu lalu harus menjadi pelajaran. Dan lazim, saat liburan DIY juga panen sampah dan seperti waktu lalu, gunung sampah akan tampak dimana-mana, aplagi pascapesta tahun baru. Ini karena dampak kunjungan yang meningkat ke Yogya masa liburan.

Kini, sampah masih menjadi problema bagi DIY khususnya. Dan kita tentu tidak ingin peristiwa waktu lalu terulang kembali seperti kejadian tumpukan sampah di Kotabaru beberapa waktu lalu. Karenanya, antisipasi terjadinya 'ledakan sampah' harus mulai dipikirkan pemda terutama bagian terkait. Mumpung masih ada waktu. ❑-d

**) Anggi, Seturan Caturtunggal Depok Sleman*

## Pojok KR

Kasus pneumonia merebak, masyarakat diimbau pakai masker.

**-- Mudah-mudahan tak seperti Covid-19.**

***

Lurah siap jadi benteng keistimewaan DIY.

**--Tak hanya lurah, tapi juga masyarakat DIY.**

***

OJK hentikan 1.641 entitas keuangan ilegal.

**-- Itu baru yang terdeteksi.**

Berabé

Kedaulatan Rakyat

**SIUPP** (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.
**Penerbit:** PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
**Perintis:** H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
**Penerus:** Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi ( 2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.
**Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

**Pemimpin Umum:** M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager :** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiwi, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Pemimpin Perusahaan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

**Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:**

**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

**Semarang :** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas :** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

**Klaten :** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

**Kulonprogo :** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

**Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.